

**OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN  
DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
PADA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2020**

**OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN  
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Manajemen Pada  
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar

**VINA ALVIANA**

**105721106016**

16/12/2020

1 org  
Smb. Alumni

Ry 0288/MAN/2020  
ALV  
0'

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2020**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Damsir dan ibu saya Latifah Hanum yang telah mengisihi saya dengan banyak kebahagiaan, memberikan saya semangat dan mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga besar saya terutama saudara saya Alvin Damala dan Akmal Huzaini yang telah memberikan dukungan untuk proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kepada kedua dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat-sahabat saya terimakasih banyak untuk semua masukan, saran dan semangat yang telah kalian berikan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

MOTTO HIDUP

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS Al Baqarah 286)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pada Provinsi Sulawesi Selatan**

**Nama Mahasiswa : VINA ALVIANA**

**No. Stambuk/NIM : 105721106016**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

**Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diteliti, diperiksa didepan panitia penguji Ujian Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 05 Desember 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Desember 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim HR, SE., M.M  
NIDN : 09111155703

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M  
NIDN : 0927078201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis

Ketua Program Studi Manajemen

Ismail Rasulong, S.E., M.M  
NBM: 903 078

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M.  
NBM: 108 5576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Uni Siswanti, NIM : 105721111416, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/61201/091004/2020 M, Tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1442 H / 05 Desember 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Rabi'ul Akhir 1442 H

Makassar

05 Desember 2020 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse. M. Ag. (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji
  1. Moh Aries Pasigai, SE., MM (.....)
  2. Faidul Adziem, SE., M.Si (.....)
  3. Nasrullah, SE., MM (.....)
  4. Syafaruddin, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM. 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : VINA ALVIANA  
Stambuk : 105721106016  
Program studi : Manajemen  
Dengan Judul : Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan  
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pada Provinsi  
Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 05 Desember 2020

buat Pernyataan :



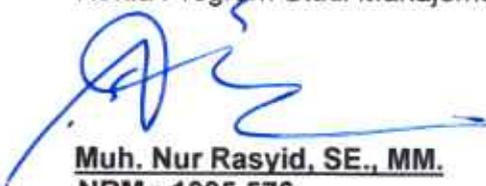
**VINA ALVIANA**

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Manajemen

  
**Ismail Rasulong, SE., MM.**  
NBM. 903 078

  
**Muh. Nur Rasyid, SE., MM.**  
NBM : 1085 576

## ABSTRAK

**VINA ALVIANA**, 2020, Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim HR dan Pembimbing II Muhammad. Nur Rasyid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik Analisis Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara pada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian pada Penelitian ini yaitu peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan target yang ingin dicapai sehingga pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan efektif. Evaluasi kinerja merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Adapun Proses Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, BAPPEDA, keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, SKPD sampai dengan MUSRENBNG Kabupaten.

Kata Kunci: Perencanaan, Evaluasi Kinerja, Pembangunan Daerah

## SUMMARY

**VINA ALVIANA, 2020, Optimizing the Role of DPRD in Planning and Evaluating Regional Development Performance in South Sulawesi Province, Thesis of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Agus Salim HR and Supervisor II Muhammad Nur Rasyid.**

This study aims to determine the optimization of the role of DPRD in planning and evaluating regional development performance in South Sulawesi Province. The type of research used is qualitative. Data analysis techniques obtained in this study are the results of interviews with members of the DPRD of South Sulawesi Province. Research results in this study are the role of the DPRD in planning and evaluating the performance of regional development in South Sulawesi Province in accordance with the targets to be achieved so that the regional development of South Sulawesi Province runs effectively. Performance evaluation is one aspect of the development management cycle, the results of which can be used as material for consideration in further decision making. The South Sulawesi Provincial RKPD Preparation Process for 2020 was carried out through a process that involved various stakeholders or stakeholders, including elements of the Regional Government and their staff, elements of the South Sulawesi Provincial DPRD, BAPPEDA, this involvement began since the implementation of the Integrated Village Level Development Planning Conference, Level Sub-district. SKPD Forum to District MUSRENBANG.

Keywords: Planning, Performance Evaluation, Regional Development

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Damsir dan ibu Latifah Hanum yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih.

Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupandi dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Nur Rasyid, SE., MM. Ketua Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR,S.E.,M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Nur Rasyid, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimakasih teruntuk semua sahabat yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhimya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak terutamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilillah fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persembahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	vii
Summary .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>

A. Tinjauan Teori .....	7
B. Tinjauan Empiris .....	16
C. Kerangka Konsep .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Fokus Penelitian .....	21
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	22
D. Sumber Data .....	22
E. Pengumpulan Data .....	23
F. Instrumen Penelitian .....	24
G. Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	27
B. Penyajian Data .....	33
C. Analisis dan Interpretasi .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Empiris .....	17
Tabel 4.1 Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 .....	28
Tabel 4.2 Alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan .....	29 ..
Tabel 4.2 Narasumber Wawancara .....	33 ..



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	22
Gambar 3.1 Teknik Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Hubbern .....	30



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara .....	63
2. Format Panduan Wawancara .....	65
3. Dokumentasi .....	69
4. Kebijakan umum dan Program pembangunan daerah .....	71
5. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan .....	90



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjalanan demokrasi telah meningkatkan kemajuan dan peningkatan sistem pemerintahan di daerah. Hal tersebut mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk terus menghasilkan kinerja yang baik dari masyarakat supaya memiliki kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memajukan institusi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Tujuan itu didasarkan dari keinginan masyarakat untuk DPRD agar memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai wakilnya di pemerintahan, berdasarkan pada aturan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan hasil kerja DPRD yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada wakilnya di daerah.

Berdasarkan ketentuan desentralisasi, pemerintah pusat akan melimpahkan kewenangan pada pemerintah daerah agar menjalankan otonomi daerah. Hal tersebut untuk ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan "pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan". Memberikan otonomi seluas-luasnya bertujuan agar meningkatkan capaian mewujudkan kualitas pembangunan di daerah untuk

tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dan keikutsertaan masyarakat. Selain itu dengan otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta kualitas daerah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Siklus pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, ditujukan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara spesifik, Undang-undang SPPN menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian dalam tahapan perencanaan yang ditujukan untuk menilai hasil ataupun capaian terhadap pelaksanaan perencanaan sebagai masukan untuk perencanaan di tahap berikutnya.

Penguatan peran evaluasi semakin jelas dan krusial melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut, Kementerian PPN/BAPPENAS mendapat mandat untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan mengevaluasi kebijakan tahun berjalan dalam rangka menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Pembangunan nasional dalam perspektif undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada konsep pembangunan nasional tersebut, evaluasi pembangunan nasional yang dilakukan Kementerian PPN/BAPPENAS meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer. Dari sisi subjek evaluasi, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi yang berbeda, namun dari sisi objek evaluasi kedua evaluasi tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan misalnya, boleh jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki program dan kebijakan yang berbeda. Namun kebijakan tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) memandang penting untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah atau EKPD. Kegiatan ini merupakan evaluasi ex-post terhadap RKP 2017, yang mengusung tema "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah". Walaupun merupakan evaluasi ex-post terhadap RKP 2017, EKPD tidak saja melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam RKP, tetapi juga kebijakan daerah yang mendukung sasaran RKP. Kegiatan EKPD dilaksanakan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS bekerja sama dengan peneliti dan profesional serta didukung oleh akademisi daerah, BAPPEDA Provinsi dan pihak-pihak lain yang relevan. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperkaya hasil analisis dan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil EKPD dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan evaluasi kinerja daerah telah dilakukan banyak peneliti antara lain:

1. Nugraha Eka Prayudha (2017). Hasil penelitiannya yaitu karena susunan anggaran daerah dipengaruhi kepada dana dari pusat sehingga tidak teraturnya penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah,

2. Ali Iswandi (2016). Hasil penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Sukamara. Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah ditetapkan sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan).

Berdasarkan peneliti sebelumnya serta latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi selatan. Masalah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah. Sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Optimalisasi peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat memperkaya kajian tentang pembangunan kinerja suatu daerah serta dengan kinerja pembangunannya;

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DPRD dalam mengevaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dapat dijadikan masukan bagi teman-teman yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian tentang keuangan daerah;
4. Dapat memberikan informasi tentang keadaan kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia
  - a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Menurut para ahli manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Menurut Handoko (2011:3), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Dessler (2015:3), manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan kompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.

Menurut Simamora dalam Sutrisno (2015:5), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

b. Fungsi-fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia

Hasibuan (2016:21) menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi:

1) Fungsi Manajerial

- a) Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.
- b) Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).
- c) Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
- d) Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan.

## 2) Fungsi Operasional

- a) Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya suatu tujuan.
- b) Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, teritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan
- c) Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau upah yang diberikan oleh suatu perusahaan.
- d) Mengintegrasikan adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
- e) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.
- f) Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa

adanya kedisiplinan yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal.

- g) Pemberhentian adalah putusya suatu hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang telah berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Secara umum mempunyai tiga fungsi dasar yaitu: fungsi perwakilan, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, fungsi legislatif dinilai oleh banyak kalangan sebagai fungsi yang paling kurang mendapat perhatian dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi, wawasan yang luas, dan kemampuan teknis yang berkualitas.

Berikut ini langkah-langkah yang akan dilewati untuk mendapatkan suatu legislatif yang berpotensi, membutuhkan tahapan yang tidak mudah (Wismar E, 2004). Wewenang DPRD adalah: DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai peran sebagai unsur Pemerintahan Daerah dan institusi Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang setara dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan-peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah:

a. Legislatif

- 1) Menyusun Program Legislatif Nasional
- 2) Menyusun dan membahas rancangan undang-undang
- 3) Menerima RUU yang diajukan DPD
- 4) Membahas RU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- 5) Memberi persetujuan atau tidak terhadap aturan untuk mengganti UU dari pemerintah untuk menetapkannya menjadi UU

b. Anggaran

- 1) Memberi persetujuan kepada RUU tentang APBN
- 2) Memberi perhatian atas pertimbangan DPD kepada RUU dengan RUU tentang APBN serta RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- 3) Menindaklanjuti penyusunan serta tanggung jawab keuangan negara dari hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK
- 4) Memberikan persetujuan untuk memberikan wewenang tentang aset negara maupun kepada perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara

c. Pengawasan

- 1) Melaksanakan pengamatan kepada pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- 2) Menindaklanjuti serta membahas hasil pengamatan yang diajukan dengan DPD (terkait pelaksanaan UU tentang otonomi daerah, pemekaran, pengelola SDA dan SDE lainnya dan penggabungan

daerah, pembentukan , pajak, pelaksanaan APBN, pendidikan dan agama)

### 3. Perencanaan Pembangunan daerah

Perencanaan adalah suatu fungsi utama perencanaan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perencanaan karena adanya ketidaksamaan pemahaman, perhatian utama, dan perbedaan pencapaian bidang pada perencanaan itu sendiri. Secara garis besar perencanaan adalah tahap menetapkan suatu tujuan setelah memahami batasan internal serta pengaruh eksternal, yang selanjutnya dipaparkan dengan jelas susunan atau tahap-tahap yang harusnya dilaksanakan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Beberapa pendapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Sondang P. Siagian perencanaan merupakan seluruh tahapan pemikiran sebagai penentu secara matang berdasarkan hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang mendatang dalam rangka yang telah ditetapkan.
- b. Menurut Pariata Westra, dalam bukunya Ensklopedia Administrasi, perencanaan merupakan Aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan perencanaan ini adalah suatu fungsi

manajer, serta fungsi-fungsi utama lainnya, yaitu pergerakan dan pengontrolan

Perencanaan pembangunan daerah yang sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu salah satu tahapan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang menyertakan beberapa unsur pemegang wewenang kepentingan di dalamnya, kegunaan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ada, dengan rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam salah satu lingkungan daerah/wilayah pada batasan waktu tertentu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah diantaranya yaitu:

- 1) Suatu kesatuan pada sistem perencanaan pembangunan nasional
- 2) Dilaksanakan pemerintah daerah serta para pemilik wewenang berdasarkan peran dan wewenang masing-masing
- 3) Memfokuskan rencana tata ruang serta rencana pembangunan daerah
- 4) Dilaksanakan berdasarkan situasi serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah, berdasarkan tahapan kemajuan daerah dan nasional.
- 5) Disusun secara terbuka, responsif, efisien, efektif, akuntabel, participative, terukur, berkeadilan, serta berkawasan lingkungan.

Rencana strategis yaitu salah satu dokumen perencanaan dengan perubahan pada hasil yang ingin dipenuhi dengan batas waktu satu sampai dengan lima tahun berhubungan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan disusun berdasarkan mempertimbangkan perkembangan lingkungan

strategis. Rencana strategis dapat ditinjau sebagai rumusan dengan keseluruhan atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang dilaksanakan untuk tercapainya hasil yang diinginkan berdasarkan penerapan strategi-strategi yang digunakan. Perangkat Daerah disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsinya untuk tercapainya tujuan dan target jangka menengah lembaga daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah seperti tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### 4. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 34 provinsi Tahun 2018 merupakan evaluasi ex-post yang di titik beratkan pada evaluasi capaian dan relevansi. Metode evaluasi yang digunakan adalah analisis gap dan analisis dokumen. Terkait pengumpulan data, metode yang dilakukan dalam EKPD terdiri atas beberapa metode antara lain metode kualitatif dan kuantitatif yang sehubungan dengan kebijakan/ kegiatan / program untuk dilakukan penilaian.

##### a. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kinerja Pembangunan

- 1) Mengevaluasi capaian pembangunan nasional di daerah
- 2) Mengevaluasi relevansi dokumen perencanaan daerah dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi ini adalah sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Metode Evaluasi Kinerja Pembangunan

1) Analisis Gap

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan nasional, analisis gap dilakukan dengan menyelidiki antara pencapaian kinerja dengan target kinerja. Dalam evaluasi capaian yang digunakan membandingkan capaian daerah dengan:

- a) Target RKP 2017 (jika ada)
- b) Capaian tahun sebelumnya
- c) Capaian nasional Analisis gap tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindak lanjut secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

2) Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan bentuk dari penelitian kualitatif dimana peneliti menginterpretasikan dokumen dalam rangka mendalami informasi terkait topik penilaian yang menjadi fokus evaluasi (Bowen, 2009) Evaluasi relevansi EKPD 2018 dilaksanakan dengan menganalisis dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) tahun 2017 mengenai prioritas dan program daerah dan membandingkannya dengan permasalahan atau tantangan daerah. Perbandingan ini

dilakukan untuk menilai apakah dokumen perencanaan daerah telah disusun dalam rangka menjawab permasalahan spesifik daerah tersebut.

## B. Tinjauan Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang diperoleh dari observasi beberapa penelitian sebelumnya. Kajian empiris adalah informasi yang membenarkan suatu penelitian dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Dalam pandangan empiris, seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris yang nyata. Dalam arti lain, Kajian empiris sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan yang telah terbukti keasliannya atau keabsahannya.

Berikut ini beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pembangunan dari beberapa jurnal dan skripsi.

**Tabel 2.1 Kajian Empiris**

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nugraha Eka Prayudha (2017)	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat	Metode penelitian Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini yaitu karena penyusunan anggaran daerah dipengaruhi pada dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah
2.	Ali Iswandi (2016)	Studi Evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukamara	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Temuan penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Sukamara. Evaluasi juga dilakukan

				untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah ditetapkan sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evaluasi pada tahap perencanaan).
3.	Tio Lestari Gaus (2016)	Analisis Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Medan	Kuantitatif	.Berdasarkan Perhitungan Indeks menunjukkan bahwa indeks kinerja ekonomi makro Kota Medan mengalami peningkatan rata-rata 49,9 pada tahun 2010-2015 dibanding periode sebelumnya sebesar 49,7.
4.	Yudianto Bahralipi (2017)	Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto	Jenis Penelitian Kualitatif	Secara keseluruhan peranan BAPPEDA dalam pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa adalah Alokasi anggaran dan sumber daya manusia, adapun upaya yang dilakukan BAPPEDA dalam pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto adalah dalam bentuk Partisipasi BAPPEDA dalam Sosialisasi MUSRENBANG dan

				Pengawasan hasil MUSRENBANG tingkat desa.
5.	Amara Costania Wijaya(2019)	Peran badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah(BAPPE LITBANGDA) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD) tahun 2017-2022 di Kabupaten Cilacap	Jenis penelitian kualitatif	Peran BAPPSELITBANGDA Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan aturan tata cara tahun sebelumnya , penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 menjadi teratur, terarah, dan tepat waktu, sesuai dengan aturan acuannya.

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan telah banyak dilakukan, sedangkan penelitian tentang peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan belum ada.

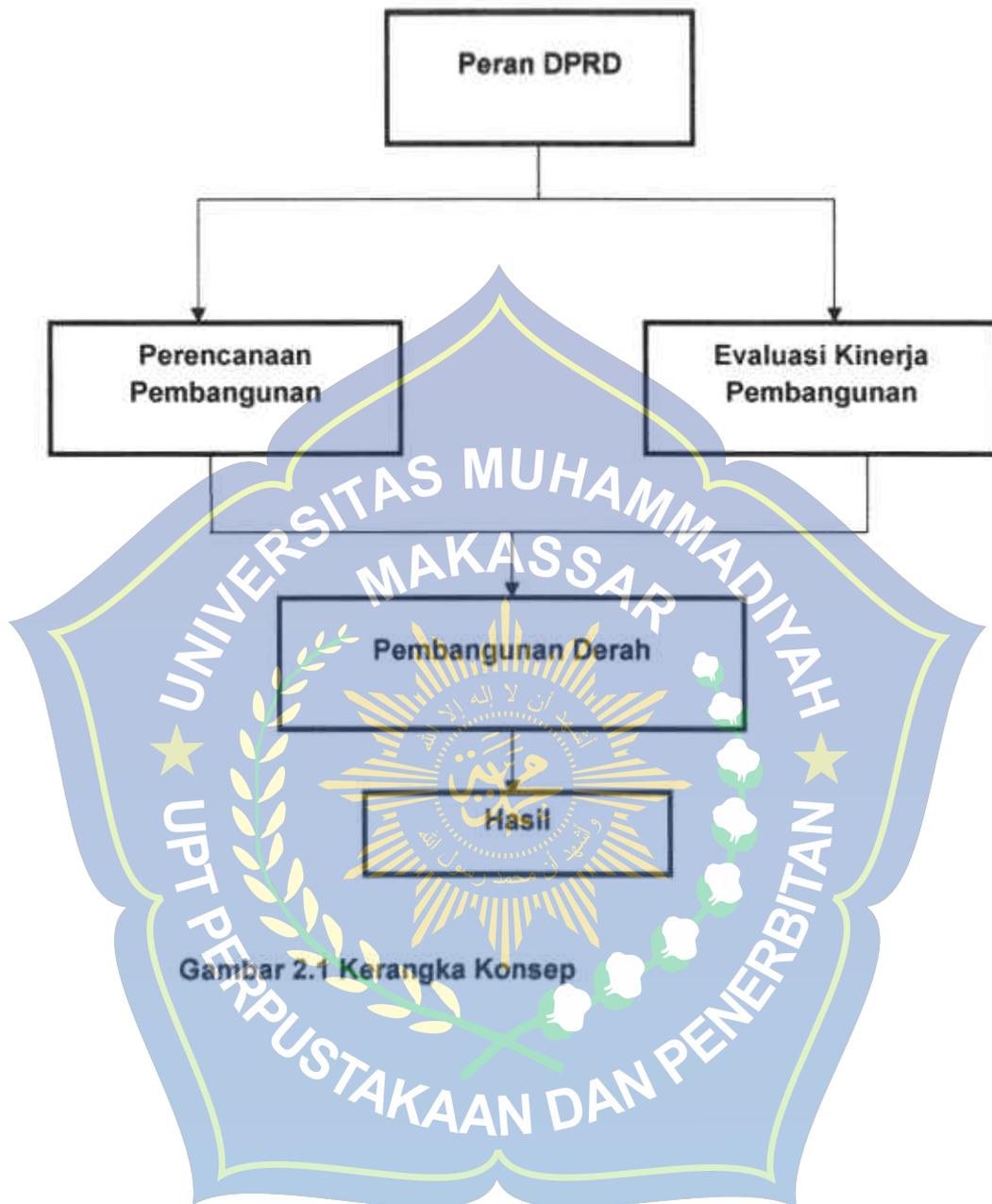
### C. Kerangka Konsep

Semua daerah mempunyai kekayaan di daerahnya yang berbeda-beda berdasarkan letak strategis dan kebudayaan di dalam daerah tersebut. Karena kekayaan daerah merupakan sumber daya yang dimiliki pada semua daerah berdasarkan perencanaan pembangunan di daerah itu. Semua pemerintah daerah harus mampu menemukan dan mengefisienkan kekayaan yang dimiliki di daerah tersebut sehingga pembangunan yang dilakukan akan

efisien dan dapat meningkat sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan .

Perencanaan ini menuntun kita pada pengambilan inisiatif yang berawal dari daerah dengan tahapan pembangunan agar memberikan peluang kerja baru dan mendorong kegiatan baru dan mendorong kegiatan ekonomi, oleh sebab itu pada membangun daerah, daerah harus memperhatikan dan menganalisis apa yang menjadi kekayaan di daerah tersebut sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Namun demikian kekayaan daerah yang dimiliki pada beberapa daerah pada umumnya tidak merata, oleh sebab itu pertumbuhannya ikut berubah-ubah. Untuk dapat tumbuh secara efisien, suatu daerah harus mempunyai satu tempat atau pusat pertumbuhan daerah yang mempunyai potensi yang berkualitas. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan lebih besar untuk tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu provinsi.

Variabel yang akan diteliti adalah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut akan digambarkan alur jalannya Perencanaan Pembangunan Evaluasi Kinerja Daerah



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memecahkan masalahnya dengan data empiris (Masyhuri dan Zainudin 2008:12). Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu salah satu penelitian dengan tujuan untuk memaparkan, memahami dan menjelaskan bagaimana tahapan peran DPRD pada perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengapa peneliti tertarik untuk menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif data yang diperoleh secara menyeluruh serta lebih lengkap sehingga masalah-masalah yang ditemukan di tempat penelitian dapat diutamakan serta penelitian kualitatif memudahkan penulis untuk menjelaskan lebih banyak informasi yang di dapat karena metode yang digunakan yaitu wawancara.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditujukan untuk memberikan batasan masalah yang akan dijelaskan di dalam penelitian tersebut. Menurut Creswell (Herdiansyah,2012:86) fokus penelitian merupakan suatu konsep atau suatu tahapan yang di eksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif.

Fokus penelitian berdasarkan masalah serta hasil yang ingin di capai pada penelitian yaitu peranan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari:

1. Seberapa besar peranan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bagaimana peran DPRD terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

### **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Penempatan lokasi penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif, dengan menentukan tempat lokasi penelitian berarti objek yang diteliti dan hasil yang ingin dicapai penelitian telah ditetapkan sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah tertentu atau salah satu institusi dalam masyarakat. Untuk mendapatkan data primer, lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengamati keadaan dan objek yang nantinya akan diteliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, sehingga yang menjadi situs penelitian pada penelitian ini adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah penjelasan dari suatu hal, dapat mengenai sesuatu yang diketahui atau anggapan (Hasan, 2002). Penelitian ini

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sesuatu yang sedang diteliti. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber, antara lain: literatur, sumber elektronik, data statistik, dan lain sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi dilaksanakan berdasarkan pengamatan dengan melibatkan peneliti. Didalam observasi peneliti berperan langsung dalam mengamati situasi yang sedang diteliti atau responden yang sedang diamati dan yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian. Dan secara bersamaan melakukan penelitian saat berlangsungnya pengamatan, peneliti ikut melakukan dan mengamati apa yang dikerjakan oleh responden atau sumber data dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2007: 64). Observasi dilakukan di tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Kantor DPRD Sulawesi Selatan.

### 2. Wawancara

Wawancara sebagai wadah yang dibutuhkan dalam mengetahui keterangan objek dan situasi suatu objek yang sedang diteliti dan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Wawancara bermaksud untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat secara lisan dari responden dengan berbicara langsung dengan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2007:73) bahwa tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara selain memberikan informasi juga diminta pendapat serta ide-ide mengenai permasalahan yang ditanyakan. Adapun para informan adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari anggota dan staf DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu yang digunakan untuk memperkuat keabsahan suatu data observasi dan wawancara kerana menunjukkan adanya kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif akan tetapi internal atau subjektif. Adapun yang dikatakan subjektif adalah berdasarkan pengamatan peneliti sendiri dengan tidak menggunakan tes, angket, atau eksperimen sedangkan instrumen dengan sendirinya tidak menggunakan definisi operasional (Nasution, 1992: 29). Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan menggunakan pengamatan situasi serta wawancara. Sebagai patokan panduan wawancara peneliti menyiapkan format beberapa pertanyaan tentang hal utama yang ingin diteliti. Format ini di tunjukkan agar memudahkan peneliti untuk melangsungkan pembicaraan atau wawancara. Berikut beberapa hal yang dibutuhkan dalam wawancara ini yaitu tape recorder dan catatan-catatan wawancara.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan menganalisis dan menyusun data dengan tersusun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengelompokkan data serta mencari data yang dibutuhkan dan yang penting untuk dipahami serta membuat kesimpulan sehingga memudahkan untuk dipahami (Sugiyono, 2007: 333). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Tahap-tahapannya yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data yaitu menyederhanakan yang dilakukan dengan menyaring, mengutamakan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga mempermudah dalam mengambil penarikan kesimpulan.

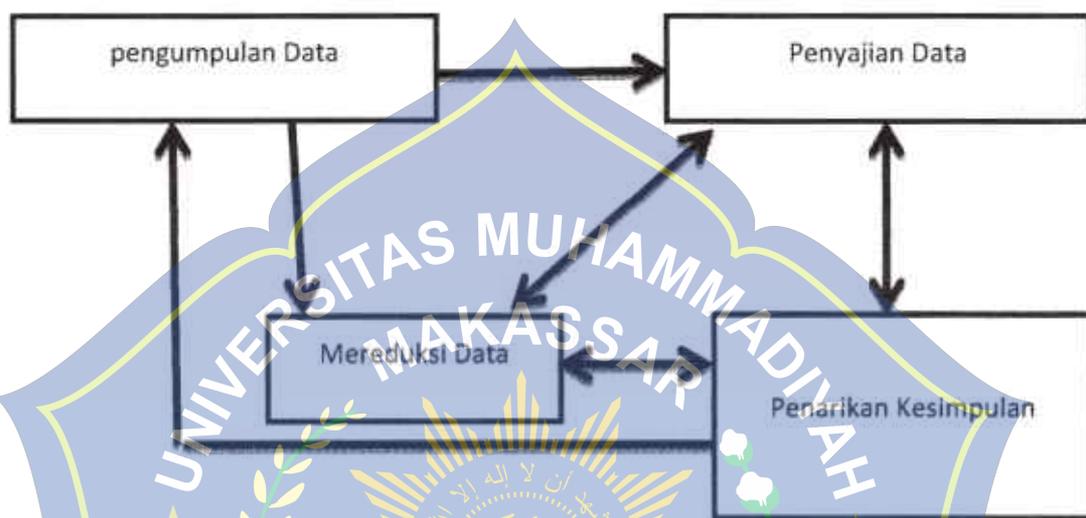
### 2. Penyajian data

Penyajian data yang selalu digunakan dalam data kualitatif yaitu bentuk naratif. Penyajian data seperti sekumpulan informasi yang disusun dengan sistematis serta mudah dimengerti.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir pada analisis data yang dilakukan peneliti dilihat hasil reduksi data tetap mengacu dalam rumusan masalah berdasarkan hasil yang akan diinginkan. Data yang sudah disusun

dibandingkan antara satu dengan yang lain agar mempermudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang ada serta memberikan solusi untuk masalah tersebut.



Gambar 3.1 : Analisis Data Kualitatif (Sugiyono, 2007: 333)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Lokasi Kantor DPRD Sulawesi Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi Kantor DPRD Sulawesi Selatan yaitu di Jalan Urip Sumoharjo No.59 Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

##### 2. Anggota DPRD Sulawesi Selatan

DPRD Sulawesi Selatan beranggotakan 85 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 24 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 13 kursi disusul oleh Partai Nasdem yang juga meraih 12 kursi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD menjadi anggota salah satu fraksi, adapun jumlah fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD Pimpinan Fraksi terdiri atas dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Fraksi mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya
- b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi
- c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota
- d. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu

Jumlah fraksi di DPRD Sulawesi Selatan selalu berubah, yaitu 9 fraksi pada periode 2009-2014, 10 fraksi pada periode 2014-2019, dan saat ini 9 fraksi pada periode 2019-2024 sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Fraksi DPRD 2019-2024**

<b>Nama Fraksi</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
Partai Golkar	13
Partai Nasional Demokrat	12

Partai Gerindra	10
Partai Demokrat	10
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai PDI Perjuangan	8
Partai Kebangkitan Bangsa	8
Partai Amanat Nasional	7
Partai Persatuan Pembangunan	8

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Sulawesi Selatan memiliki 5 komisi sebagai berikut:

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan
- b. Komisi B Bidang Ekonomi
- c. Komisi C Bidang Keuangan
- d. Komisi D Bidang Pembangunan
- e. Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024:

**Tabel 4.2 Alat Kelengkapan DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024**

Nama AKD	Ketua	Wakil Ketua
Pimpinan DPRD	Ina Kartika Sari	1. Syahrudin Alrif 2. Darmawangsyah Muin 3. Ni'matullah 4. Muzayyin Arif
BAMUS Badan Musyawarah	Marjono	1. Desy Susanty Sutomo

		2. Jabbar Idris
BANGGAR Badan Anggaran	Rudy Pieter Goni	1. Fahrudin Rangga
BAPEMPERDA Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Azhar Arsyad	1. Andi Januar Jaury Dharwis 2. Andi Syafiuddin Patahuddin
BK Badan Kehormatan	Andi Muhammad Irfan A.B	Andi Hatta Marakarma
Komisi A Bidang Pemerintahan	Selle K.S Dalle	1. Syamsuddin Carlos 2. Rahman Pina
Komisi B Bidang Ekonomi	Andi Rachmatika Dewi	1. Firmina Tallulembang 2. Nurhidayati
Komisi C Bidang Keuangan	Vera Firdaus	1. Ady Ansar 2. Dan Pontasik
Komisi D Bidang Pembangunan	Jhon Rende Mangontan	1. Hengky Yasin 2. Fadriaty A.S
Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rusdin Tabi	1. Arum Spink 2. Ince Langke

### 3. Visi dan Misi DPRD Sulawesi Selatan

#### a. Visi

Hadirkan Pelayanan kesekretariatan yang berkualitas, responsive, fleksibel dan akuntabilitas dalam mendukung peningkatan kinerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

b. Misi

- 1) Terwujudnya Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

4. Fungsi DPRD Sulawesi Selatan

c. DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Pembentukan peraturan daerah;
- 2) Anggaran; dan
- 3) Pengawasan.

d. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

e. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

f. Fungsi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
- 2) Mengajukan usul rancangan peraturan daerah; dan
- 3) Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Gubernur.

g. Program pembentukan PERDA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA.

h. Program pembentukan PERDA ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.

## 5. Hak dan Kewajiban DPRD Sulawesi Selatan

### a. Anggota DPRD mempunyai hak :

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;
- 5) Membela diri;
- 6) Imunitas;
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) Protokol dan
- 9) Keuangan dan administratif.

### b. Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7) Menaati tata tertib dan kode etik;

- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- 11) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### **B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

Wawancara digunakan dengan menggunakan teknik purposive dengan beberapa informan yang dilakukan langsung di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo No 59, Karuwi Utara, Kec Panakukkang, Kota Makassar. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif dan sangat mematuhi protokol kesehatan yaitu **Bapak Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn (Anggota DPRD Provinsi Sulaesi Selatan)** dan **Bapak Muh. Musdar, SE.,M.Si (Analisis Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan)**

Wawancara dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 September 2020 langsung dengan 2 narasumber yaitu **Bapak Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn (Anggota DPRD Provinsi Sulaesi Selatan)** dan **Bapak Muh. Musdar, SE.,M.Si**. Wawancara dilakukan dengan sangat terbatas dikarenakan dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk terlalu banyak melakukan interaksi dengan para narasumber sehingga dilaksanakan sebagai mana adanya

dan juga di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan sistem social distancing sesuai anjuran pemerintah.

Data yang didapatkan dilengkapi dengan data hasil observasi dan wawancara langsung dilokasi penelitian yaitu kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat substansi hasil observasi dan wawancara, maka peneliti juga melakukan dokumentasi bersama narasumber semua data dan hasil penelitian ini kemudian diuraikan sesuai dengan fokus pertanyaan dari setiap variabel penelitian disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Narasumber Wawancara

NO	Narasumber	Jabatan
1	Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn	Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2	Muh. Musdar, SE.,M.Si	Analisis Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan

Peneliti melakukan wawancara Pertama Selasa, 22 September 2020 kepada Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pukul 14.00 WITA kepada bapak Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn,

Pertanyaan Pertama yaitu Menurut bapak apa itu pembangunan daerah, dan apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan daerah?

Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

"Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

lapangan kerja baru selain itu jug merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah sedangkan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah "

Kemudian Peneliti mengajukan pertanyaan kedua, Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

"Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan merajuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta".

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan ketiga, Bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

"dalam perencanaan pembanguan DPRD melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah daerah sedangkan dalam evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan-

masukannya yang berkenaan dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah”.

Pertanyaan keempat, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

“Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program”

Pertanyaan kelima, Apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah bapak sudah sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

“ Perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai dengan RKPD dan MUSRENBANG”

Pertanyaan Keenam, Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pembangunan? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

"Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedangkan keberhasilan suatu evaluasi kinerja pembangunan dilihat dari target capaian indicator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator kinerja pembangunan itu".

Pertanyaan Ketujuh, Selain DPRD apakah ada instansi yang juga berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? Narasumber bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

"Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan"

Peneliti melakukan wawancara Kedua pada hari yang sama hari Selasa, 22 September 2020 pada pukul 15.00 WITA kepada Analis perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muh. Musdar, SE., M.Si.

Pertanyaan pertama, Apakah peran BAPPEDA dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan ? narasumber Bapak Muh. Musdar menjawab :

"Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, yang pertama menyusun

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan yang kedua menetapkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)"

Pertanyaan Kedua, Apakah pembangunan pada Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan tujuan capaian pembangunan daerah? narasumber Bapak Muh. Musdar menjawab :

"Samapai dengan tahun kedua masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Suaiman capaian target pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan koneksitas yang baik antara daerah di Sulawesi Selatan"

Pertanyaan ketiga, Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? narasumber Bapak Muh. Musdar menjawab :

"yang pertama peran DPRD yaitu sebagai penganggaran dan yang kedua sebagai pengawas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan"

Pertanyaan Keempat, Apakah ada kerjasama antara BAPPEDA dan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan? narasumber Bapak Muh. Musdar menjawab :

"Iya, BAPPEDA dan DPRD bekerjasama dalam rangka pembahasan anggaran, menetapkan PERDA, dan mengawasi pelaksanaannya"

## C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

### 1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber **Bapak Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn** (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu menyusun dan membahas anggaran APBD, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembangunan yaitu diawali dengan pembahasan anggaran yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dan yang terakhir melakukan MUSRENBANG dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya target pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ketika proses musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) terintegrasi dengan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah (RKPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

### 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bapak Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.,M.Kn (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) bahwa peran DPRD dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta. Langkah-langkah penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program, sedangkan faktor-faktor pendukung tercapainya evaluasi kinerja pembangunan yaitu dilihat dari target capaian indicator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil wawancara dan pembahasan diatas yang mendorong tercapainya target perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ketika proses MUSRENBANG yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKP, dan saat ini pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dapat dilihat dari pembangunan infratraktur dan hubungan anatara daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka penelitian tentang Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan fungsinya dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hasil temuan dan evaluasi DPRD mengungkapkan bahwa pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian adalah:

1. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan.
2. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih transparan. dengan membuka akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi dokumen-dokumen publik, dengan demikian masyarakat akan dapat melakukan kontrol sosial, sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pemerintah daerah dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar WS,Suwondo.2017.*Analisis Dewan Perwakilan Rakyat Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-2014*.Skripsi.Universitas Lampung.Bandar Lampung
- Bahralipi, Yudiatno.2017.*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bambang, Yudoyono.2003.*Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggaran DPRD*.Jakarta.Pustaka Sinar Harapan
- Costania, Wijaya, Amara.2019.*Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah(BAPPELITBANGDA) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2017-2022 di Kabupaten Cilacap*.Cilacap.Skripsi.Universitas Islam Indonesia.
- Hadari,Nawawidan Mimi, Martini.1996.*Penelitian Terapan*.Yogyakarta.Universitas Gadjah Mada
- Iswandi, Ali.2016.*Studi Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukamara*.Skripsi.Universitas Terbuka.Jakarta
- Lestari Gaus,Tio.2016.*Analisis Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Medan*.Medan.Skripsi.Universitas Sumatera Utara
- Masri.1989.*Metode Penelitian Survey*.LP3ES.Jakarta

Masyari dan Zainuddin.2008.*Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*.Bandung.PT Refika Aditama

Nasutio,S.1992.*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.Bandung.Tarsito

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) tentang Pemerintahan daerah menyebutkan; Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi.

Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Prayudha Nugraha Eka.2017.*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat*.Skripsi.Universitas Lampung.Bandar Lampung

Siagian,Sondang P.2016.*Teori dan Praktek Kepemimpinan*.Jakarta.Rineka Cipta

Siswanto.2014.*Kajian Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Grobogan Tahun 2013*.Jurnal.<https://jurnal.uns.ac.id>.Diakses tanggal 5 Juli 2020

Soares,Armando.Pratiwi,Ratih Nur dan Makmur M.2015.*Peran Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*.Jurnal.[https://publikasi unitri.ac.id](https://publikasi.unitri.ac.id).Diakses Tanggal 5 Juli 2020

Sugiono.2007.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung.ALFA BETA

Syahrizal, Adi. 2016. *Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kota Lumbuklinggau*. Skripsi. Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Wismar E. 2004. *Analisis Peran Badan Legislatif Daerah dalam Pembentukan PERDA (Studi di DPRD Kota Yogyakarta)*. Tesis. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta





## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.M.Kn

Jabatan : Anggota DPRD Sulawesi Selatan

Tanggal : 22 September 2020

Waktu : 14.00 Wit

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Sulawesi Selatan

Topik Wawancara : Peran DPRD pada Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Materi Wawancara</b>	
Peneliti	Menurut Bapak apa itu pembangunan daerah, apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan suatu daerah?
Informan	Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru selain itu jug merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah sedangkan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah
Peneliti	Apakah Peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

Informan	Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan merujuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan swasta.
Peneliti	Bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah?
Informan	dalam perencanaan pembanguan DPRD melakukan pembahasan anggaran dengan Pemerintah daerah sedangkan dalam evaluasi kinerja pembangunan DPRD melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan-masukan yang berkenaan dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah
Peneliti	Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?
Informan	Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat

	<p>Desa, Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya</p> <p>Tahap Pelaksanaan (on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun, manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program</p>
Peneliti	<p>Apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah Bapak/ibu telah sesuai atau telah meningkatkan pembangunan daerah? Jika belum apa yang menyebabkan belum sesuai?</p>
Informan	<p>Perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai dengan RKPD dan MUSRENBANG</p>
Peneliti	<p>Menurut Bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?</p>
Informan	<p>Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedangkan keberhasilan suatu evaluasi kinerja pembangunan dilihat dari target capaian indicator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator kinerja pembangunan itu</p>

Peneliti	Selain DPRD apakah ada instansi yang berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja?
Informan	Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan
Refleksi	Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada provinsi sulawesi selatan yaitu sebagai penganggaran dan pengawasan, serta pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai berdasarkan perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah disusun sebelumnya.



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Muhammad Musdar, SE.,M.Si

Jabatan : Analis Perencanaan

Tanggal : 22 September 2020

Waktu : 11.00 Wit

Tempat Wawancara : Kantor BAPEDA Sulawesi Selatan

Topik Wawancara : Peran DPRD pada Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah peran BAPEDA dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Sulawesi Selatan?
Informan	Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang pertama menyusun rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan yang kedua menetapkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)
Peneliti	Apakah pembangunan daerah telah sesuai yang diharapkan? Jika belum apa saja yang menghambat?
Informan	Sampai dengan tahun kedua masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman capaian target pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dan terjadinya koneksi tas yang baik antara daerah di Sulawesi Selatan
Peneliti	Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja

	pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan?
Informan	Peran DPRD yaitu yang pertama itu pengawasan yang kedua penganggaran yang terakhir yaitu sebagai legislatif
Peneliti	Apakah ada kerja sama antara BAPEDA dan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan?
Informan	Iya, BAPEDA dan DPRD bekerja sama dalam rangka pembahasan anggaran, menetapkan PERDA dan mengawasi pelaksanaannya
Refleksi	Berdasarkan hasil wawancara diatas BAPEDA dan DPRD bekerja sama dalam pembahasan anggaran, menetapkan PERDA dan mengawasi pelaksanaannya serta pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai seperti target yang ingi dicapai berdasarkan perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.



## FORMAT WAWANCARA

**Nama** : .....

**Jabatan** : .....

**Tanggal** : .....

**Tempat** : .....

**Waktu** : .....

Wawancara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

1. Menurut Bapak/ibu apa itu pembangunan daerah, apa saja faktor-faktor pendukung pembangunan suatu daerah?

Jawaban:

2. Apakah Peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

Jawaban:

3. Bagaimana cara DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah?

Jawaban:

4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

Jawaban:

5. Apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah Bapak/ibu telah sesuai atau telah meningkatkan pembangunan daerah? Jika belum apa yang menyebabkan belum sesuai?

Jawaban:

6. Menurut Bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang mendorong berhasilnya suatu perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

Jawaban:

7. Selain DPRD apakah ada instansi yang berperan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja?

Jawaban:



**FORMAT WAWANCARA**

**Nama** : .....

**Jabatan** : .....

**Tanggal** : .....

**Tempat** : .....

**Waktu** : .....

Wawancara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Menurut Bapak/ibu apa itu pembangunan daerah?

Jawaban:

2. Apakah peranan BAPEDA dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah?

Jawaban:

3. Bagaimana langkah-langkah BAPEDA dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan di daerah?

Jawaban:

4. Apakah Pembangunan daerah telah sesuai dengan yang diharapkan? Jika belum apakah yang menghambat?

Jawaban:

5. Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja selama ini dapat meningkatkan pembangunan daerah?

Jawaban:

6. Apakah ada kerja sama antara BAPEDA dan DPRD dalam merencanakan dan evaluasi kinerja pembangunan?

Jawaban:

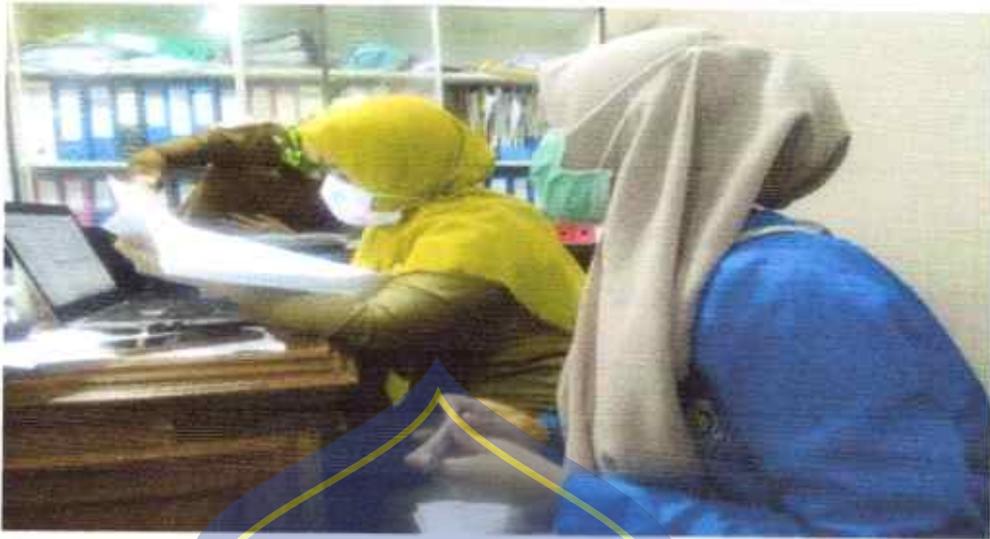
7. Apa saja yang dilupakan BAPEDA dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja pembangunan?

Jawaban:



DOKUMENTASI







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562  
M A K A S S A R 90232

Makassar, 17 September 2019

Nomor : 410/ 452 /Set. DPRD.  
Lamp :  
Perihal : **Jawaban permohonan  
Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
di-

**Makassar**

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara nomor : 21210/05/C.4-II/VIII/41/2020, tanggal 14 september 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa pada dasarnya kami bersedia menerima Mahasiswa Saudara untuk melakukan Penelitian di Instansi kami sesuai jumlah Mahasiswa yang diusulkan atas nama :

Nama : Vina Alviana  
Stambuk : 105721106016  
Jurusan : Manajemen  
Judul Penelitian : **Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar kiranya Mahasiswa(i) Bapak dapat mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan menyerahkan pas Foto ukuran 3 X 4 cm 1 (satu) lembar sebagai bahan kelengkapan administrasi.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL**

  
**Drs. M. JABIR, M. Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip. 19661031 198709 1001

Tembusan :

1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
2. Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;  
Pertinggal.

## RIWAYAT HIDUP



Vina Alviana Lahir di Luwu Utara Tepatnya di Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Pada tanggal 12 Maret 1998 Penulis Merupakan ANak Kedua dari 3 Bersaudara Buah Hati dari Pasangan Damsir dan Latipah Penulis Melalui Pendidikan pada Sekolah dasar di kabupaten Luwu Utara Tepatnya di SD 120 Gontang Kecamatan Mappedeceng Pada tahun 2004 – 2010 Penulis Kemudian melanjutkan pendidikan ke Tingkat Peratamas Yakni Smp Negeri 1 Mappedceng Desa Cendana Putih Kecamatan Mappe deceng pada tahun 2010 -2013 lalu melanjutkan ke tingkat menengah yakni SMA negeri 9 luwu utara dengan Megambil jurusan Ips di tahun 2013 -2016 Penulis di terima sebagai mahasiswa manajemen di fakultas Ekonomi dan Bisnis (Feb) Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) pada Tahun 2016

